



Integrasi Kearifan Lokal Dalam Responsivitas Tata Kelola Layanan Publik Berkalajutan Studi Ekowisata Budaya Gurabunga

Sulha^{1*}, Mediyana Udin²

Universitas Nuku, Indonesia

Received: 19 November 2025

Revised: 28 Januari 2025

Accepted: 5 Februari 2026

Abstract

This article analyzes the integration of local wisdom in enhancing the responsiveness of sustainable public service governance within the development of cultural ecotourism in Gurabunga Village, Tidore Islands City. In the post-bureaucratic reform era, public services are required to move beyond procedural efficiency toward socio-cultural responsiveness that reflects local values and identities. This study employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving local government officials, traditional leaders, ecotourism actors, and community members. The findings demonstrate that local wisdom—manifested through customary deliberation, collective participation, and culturally embedded environmental ethics—plays a strategic role in strengthening policy legitimacy, improving community trust, and supporting sustainability. However, a responsiveness gap persists when public service policies are implemented in an administrative-procedural manner without substantive involvement of adat institutions. The study concludes that the integration of local wisdom is a fundamental prerequisite for achieving responsive and sustainable public service governance in cultural ecotourism areas.

Kata Kunci: local wisdom, responsiveness, public service governance, cultural ecotourism, sustainability

(*) Corresponding Author:

¹⁾Sulhabaco@gmail.com, ²⁾Mediyanaudin12@gmail.com

How to Cite: Sulha, S., & Udin, M. (2026). Integrasi Kearifan Lokal Dalam Responsivitas Tata Kelola

Layanan Publik Berkalajutan Studi Ekowisata Budaya Gurabunga. *Jurnal Ilmiah Wahana*

Pendidikan, 12(2.D), 277-283. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13818>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia pasca reformasi birokrasi menuntut transformasi tata kelola yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada efisiensi teknokratis, tetapi juga pada kedalaman responsivitas sosiokultural. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah lokal dituntut memiliki kapasitas adaptif untuk menyelaraskan kebijakan formal dengan nilai, norma, dan praktik sosial yang hidup serta diinternalisasi oleh masyarakat setempat. Responsivitas tata kelola dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kecepatan pelayanan atau kepatuhan prosedural, melainkan sebagai kemampuan negara dalam memahami, mengakomodasi, dan mengintegrasikan aspirasi serta identitas sosial warga ke dalam keseluruhan proses kebijakan publik (Bovaird & Loeffler, 2020; Andrews et al., 2021).

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kearifan lokal dipandang sebagai modal sosial strategis yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kohesi sosial. Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai lokal dalam tata kelola publik berkontribusi terhadap meningkatnya legitimasi kebijakan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Nurmandi et al., 2020; Sabaruddin & Suyanto, 2022). Namun demikian, berbagai penelitian juga mengungkap adanya diskoneksi antara desain kebijakan publik yang bersifat top-down



dengan praktik nilai-nilai lokal di tingkat komunitas. Diskoneksi tersebut kerap melahirkan kebijakan yang kurang responsif, lemah secara sosial, dan rentan terhadap resistensi masyarakat lokal (Fung & Wright, 2020; Dwiyanto et al., 2020).

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam konteks pengembangan ekowisata budaya, sebuah sektor yang menempatkan budaya dan lingkungan sebagai aset utama sekaligus fondasi keberlanjutan. Ekowisata budaya menuntut tata kelola layanan publik yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga sensitif terhadap struktur sosial dan institusi lokal yang mengatur relasi masyarakat dengan ruang budaya dan ekologisnya (Mihalic & Kušcer, 2020; Prabowo & Santoso, 2022). Kelurahan Gurabunga di Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah dengan kekuatan adat yang masih sangat dominan, di mana lembaga adat dan nilai tradisional memainkan peran penting dalam pengaturan ruang sosial, budaya, dan lingkungan.

Namun, pengamatan awal menunjukkan bahwa praktik tata kelola layanan publik di sektor ekowisata Gurabunga masih cenderung mengedepankan pendekatan administratif-prosedural, seperti pencapaian target kunjungan wisata dan pembangunan fisik, tanpa integrasi substantif terhadap institusi adat sebagai mitra strategis. Kondisi ini memunculkan paradoks tata kelola, di mana kebijakan yang secara normatif diarahkan untuk mendorong keberlanjutan justru berpotensi menciptakan celah responsivitas, melemahkan legitimasi kebijakan, serta mengancam keberlanjutan ekowisata budaya dalam jangka panjang (Haryanto et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integrasi kearifan lokal dalam meningkatkan responsivitas tata kelola layanan publik berkelanjutan pada pengembangan ekowisata budaya di Kelurahan Gurabunga, Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi empiris pada konteks lokal, tetapi juga memperkaya pengembangan konsep responsivitas tata kelola layanan publik melalui pendekatan sosiokultural yang relevan bagi wilayah berbasis masyarakat adat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian responsivitas dalam tata kelola pemerintahan pada lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran fokus dari pendekatan administratif menuju pendekatan adaptif dan kontekstual. Bovaird dan Loeffler (2020) menekankan bahwa responsivitas tidak hanya berkaitan dengan kecepatan layanan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah memahami kebutuhan warga yang beragam dan dinamis. Studi terbaru oleh Andrews, Boyne, dan Entwistle (2021) menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penelitian Dwiyanto dan kolega (2020) menegaskan bahwa kegagalan responsivitas pelayanan publik sering terjadi ketika kebijakan dirumuskan secara top-down tanpa sensitivitas terhadap konteks sosial lokal.

Penelitian lima tahun terakhir juga memperkuat posisi kearifan lokal sebagai modal sosial dan institusional dalam pembangunan berkelanjutan. Studi oleh Nurmandi et al. (2020) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan publik daerah meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, penelitian Sabaruddin dan Suyanto (2022) menemukan bahwa kearifan lokal berperan sebagai mekanisme informal yang efektif dalam mengelola sumber daya alam dan mencegah konflik sosial. Hasil serupa ditunjukkan oleh disertasi Rahman (2021) yang menegaskan bahwa pengakuan terhadap institusi adat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Dalam aspek partisipasi masyarakat, literatur mutakhir menekankan pentingnya partisipasi substantif sebagai prasyarat responsivitas tata kelola. Fung dan Wright (2020)

mengemukakan bahwa partisipasi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat meningkatkan kualitas keputusan publik. Penelitian pariwisata berbasis komunitas oleh Suansri dan Yeejaw-haw (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata memperkuat keberlanjutan ekonomi dan sosial. Di Indonesia, studi oleh Haryanto et al. (2023) membuktikan bahwa pelibatan tokoh adat dalam perencanaan pariwisata daerah meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi resistensi kebijakan.

Dalam konteks ekowisata budaya, penelitian lima tahun terakhir menegaskan pentingnya integrasi nilai lokal dalam tata kelola berkelanjutan. Studi oleh Mihalic dan Kuščer (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan ekowisata sangat ditentukan oleh keselarasan antara kebijakan publik dan nilai budaya masyarakat setempat. Penelitian terbaru oleh Prabowo dan Santoso (2022) di Indonesia menemukan bahwa pengabaian kearifan lokal dalam pengembangan ekowisata menyebabkan lemahnya responsivitas kebijakan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih memosisikan kearifan lokal sebagai faktor pendukung keberlanjutan, dan belum secara eksplisit menempatkannya sebagai fondasi institusional pembentuk responsivitas tata kelola layanan publik.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu lima tahun terakhir tersebut, masih terdapat celah kajian yang menempatkan kearifan lokal sebagai basis institusional dalam membangun responsivitas tata kelola layanan publik. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji integrasi kearifan lokal sebagai mekanisme utama pembentuk responsivitas dan legitimasi kebijakan, khususnya dalam konteks pengembangan ekowisata budaya berkelanjutan di Kelurahan Gurabunga, Kota Tidore Kepulauan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika integrasi kearifan lokal dalam responsivitas tata kelola layanan publik berkelanjutan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Gurabunga, Kota Tidore Kepulauan, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki kekuatan institusi adat yang masih dominan serta menjadi salah satu kawasan pengembangan ekowisata budaya.

Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap isu yang diteliti. Informan meliputi aparatur pemerintah kelurahan, tokoh adat, pelaku ekowisata, serta masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam aktivitas ekowisata budaya. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai aktor yang terlibat dalam tata kelola layanan publik di tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan; observasi partisipatif untuk memahami praktik tata kelola dan interaksi sosial secara kontekstual; serta studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan arsip terkait pengelolaan ekowisata. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga temuan penelitian berkembang dari data empiris di lapangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode guna meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil temuan penelitian secara sistematis dan logis dengan mengaitkan data empiris di Kelurahan Gurabunga dengan konsep responsivitas tata kelola layanan publik dan kearifan lokal sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan.

Temuan penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan model konseptual untuk memperjelas pola hubungan antarvariabel.

Integrasi Kearifan Lokal dalam Responsivitas Tata Kelola Layanan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal di Kelurahan Gurabunga tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi telah terintegrasi secara substantif dalam praktik tata kelola layanan publik, khususnya dalam pengembangan ekowisata budaya. Integrasi tersebut membentuk pola responsivitas yang kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Tabel 1. Matriks Integrasi Kearifan Lokal dalam Responsivitas Tata Kelola Layanan Publik Ekowisata Gurabunga.

Dimensi Kearifan Lokal	Praktik Tata Kelola Layanan Publik	Bentuk Responsivitas	Implikasi Keberlanjutan
Musyawaharah adat	Pelibatan tokoh adat dalam perencanaan ekowisata	Responsivitas aspiratif	Legitimasi kebijakan meningkat
Nilai kolektivitas	Pengelolaan wisata berbasis komunitas	Responsivitas partisipatif	Kohesi sosial terjaga
Etika lingkungan adat	Perlindungan ruang sakral dan alam	Responsivitas ekologis	Keberlanjutan lingkungan

Sumber olahan penelitian, (2026)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa setiap dimensi kearifan lokal di Gurabunga berkontribusi langsung dalam membentuk responsivitas tata kelola layanan publik. Musyawarah adat memungkinkan penyerapan aspirasi masyarakat secara substantif, nilai kolektivitas mendorong partisipasi aktif warga, sementara etika lingkungan adat menjadi dasar perlindungan ekologis. Temuan ini menegaskan bahwa responsivitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi berakar pada nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Perbandingan Pendekatan Tata Kelola Layanan Publik Ekowisata

Untuk memperjelas perbedaan tingkat responsivitas, penelitian ini membandingkan pendekatan administratif-prosedural dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Perbandingan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana masing-masing pendekatan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, serta dinamika sosial masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata budaya. Pendekatan administratif-prosedural cenderung menempatkan kebijakan sebagai instrumen teknokratis yang berorientasi pada kepatuhan prosedur dan pencapaian target formal, sehingga partisipasi masyarakat bersifat terbatas dan legitimasi kebijakan relatif lemah. Sebaliknya, pendekatan berbasis kearifan lokal menempatkan nilai adat dan institusi lokal sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan, yang mendorong keterlibatan masyarakat secara substantif, memperkuat kepercayaan publik, serta menghasilkan tata kelola yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Tabel 2. Perbandingan Pendekatan Tata Kelola Layanan Publik Ekowisata

Aspek	Administratif Prosedural	Berbasis Kearifan Lokal
Pola kebijakan	Top-down	Kolaboratif-adat
Partisipasi	Formal dan terbatas	Substantif dan aktif
Legitimasi	Lemah	Kuat
Keberlanjutan	Rentan konflik	Adaptif dan berkelanjutan

Sumber olahan penelitian (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal memiliki tingkat responsivitas dan keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan administratif semata. Pendekatan administratif cenderung menghasilkan partisipasi formal dan legitimasi yang lemah, sedangkan pendekatan berbasis kearifan lokal mendorong kolaborasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan tata kelola yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekologis.

Model Konseptual Integrasi Kearifan Lokal dan Responsivitas Tata Kelola



Sumber : (Olahan peneliti 2026)

Gambar 1 menggambarkan alur logis integrasi kearifan lokal dalam membentuk responsivitas tata kelola layanan publik yang berkelanjutan. Model ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat berperan sebagai fondasi legitimasi kebijakan, yang kemudian mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat responsivitas tata kelola, dan berujung pada keberlanjutan ekowisata budaya.

Model konseptual ini dikembangkan sebagai sintesis antara temuan empiris di Gurubunga dan kerangka teoritis responsivitas tata kelola. Dengan demikian, model ini menjelaskan mekanisme bagaimana nilai lokal bertransformasi menjadi praktik institusional dalam tata kelola layanan publik.

Diskusi Temuan dan Implikasi

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi-studi terdahulu yang menekankan pentingnya kearifan lokal dalam tata kelola pariwisata berbasis komunitas, terutama dalam meningkatkan legitimasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menempatkan responsivitas tata kelola sebagai jembatan konseptual antara kearifan lokal dan keberlanjutan layanan publik.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya konsep tata kelola responsif dengan memasukkan kearifan lokal sebagai variabel institusional yang membentuk kapasitas adaptif pemerintah daerah. Secara aplikatif, penelitian ini merekomendasikan penguatan kemitraan kolaboratif antara pemerintah daerah dan lembaga adat sebagai strategi utama dalam pengelolaan ekowisata budaya yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas tata kelola layanan publik dalam pengembangan ekowisata budaya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah

dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam proses kebijakan. Kearifan lokal, melalui pengakuan dan pelibatan aktif lembaga adat, berfungsi sebagai mekanisme institusional yang memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat secara bermakna. Integrasi tersebut memungkinkan terwujudnya tata kelola yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologis. Oleh karena itu, pengembangan tata kelola layanan publik yang kolaboratif dan berbasis kearifan lokal menjadi prasyarat strategis bagi keberlanjutan ekowisata budaya di tingkat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Gurabunga, para tokoh adat, pelaku ekowisata, serta masyarakat lokal yang telah memberikan dukungan, keterbukaan, dan partisipasi aktif selama proses penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan fasilitasi, masukan, dan bantuan data sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kontribusi seluruh pihak tersebut sangat berperan dalam memperkaya analisis dan memperkuat temuan penelitian terkait integrasi kearifan lokal dalam responsivitas tata kelola layanan publik berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R., Boyne, G. A., & Entwistle, T. (2021). Public service performance: The role of management and context. *Public Management Review*, 23(3), 395–416. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1638436>
- Andrews, R., Boyne, G. A., & Entwistle, T. (2021). Public service performance: The role of management and context. *Public Management Review*, 23(3), 395–416. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1638436>
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2020). From engagement to co-production: How users and communities contribute to public services. *Public Management Review*, 22(3), 383–401. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1605281>
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2020). From engagement to co-production: How users and communities contribute to public services. *Public Management Review*, 22(3), 383–401. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1605281>
- Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Setiadi, W. (2020). Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 101–118.
- Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Setiadi, W. (2020). Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 101–118.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2020). Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 48(4), 565–593. <https://doi.org/10.1177/0032329220940695>
- Fung, A., & Wright, E. O. (2020). Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 48(4), 565–593. <https://doi.org/10.1177/0032329220940695>
- Haryanto, J., Suyatna, H., & Kurniawan, T. (2023). Community participation and local institutions in sustainable tourism governance. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(6), 1287–1304. <https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2041256>
- Haryanto, J., Suyatna, H., & Kurniawan, T. (2023). Community participation and local institutions in sustainable tourism governance. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(6), 1287–1304. <https://doi.org/10.1080/09669582.2022.2041256>
- Mihalic, T., & Kuščer, K. (2020). Impacts of overtourism on sustainability of destinations. *Tourism Management Perspectives*, 33, 100–110. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100689>

- Mihalic, T., & Kuščer, K. (2020). Impacts of overtourism on sustainability of destinations. *Tourism Management Perspectives*, 33, 100689. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100689>
- Nurmandi, A., Qodir, Z., Jubba, H., & Purnomo, E. P. (2020). Local wisdom and public policy responsiveness in decentralised governance. *Policy & Society*, 39(3), 364–381. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1784072>
- Nurmandi, A., Qodir, Z., Jubba, H., & Purnomo, E. P. (2020). Local wisdom and public policy responsiveness in decentralised governance. *Policy & Society*, 39(3), 364–381. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1784072>
- Prabowo, A., & Santoso, B. (2022). Local wisdom-based ecotourism governance in Indonesia. *Asian Journal of Tourism Research*, 7(2), 145–162.
- Prabowo, A., & Santoso, B. (2022). Local wisdom-based ecotourism governance in Indonesia. *Asian Journal of Tourism Research*, 7(2), 145–162.
- Rahman, F. (2021). *Integrasi kelembagaan adat dalam tata kelola kebijakan publik daerah* (Disertasi doktoral). Universitas Gadjah Mada.
- Sabaruddin, A., & Suyanto, B. (2022). Local institutions and sustainable natural resource management. *Environmental Policy and Governance*, 32(4), 287–299. <https://doi.org/10.1002/eet.1987>
- Sabaruddin, A., & Suyanto, B. (2022). Local institutions and sustainable natural resource management. *Environmental Policy and Governance*, 32(4), 287–299. <https://doi.org/10.1002/eet.1987>
- Suansri, P., & Yeejaw-haw, S. (2021). Community-based tourism and sustainability. *Tourism Recreation Research*, 46(2), 214–226. <https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1765227>